

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi disegala bidang. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa salah satunya dengan cara mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menyampaikan informasi yang relevan sesuai dengan program yang telah dicanangkan kepada masyarakat.

Pada era perubahan ini pula pemerintah menerapkan sistem *reward* kepada instansi pemerintah pusat baik kementerian maupun lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi berupa tambahan penghasilan yaitu tunjangan kinerja. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN,

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. (www.pemerintah.net/reformasi-birokrasi)

Tunjangan kinerja diberikan kepada kementerian lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi yang sekaligus menuntut peningkatan kinerja instansi pemerintah. Baik atau buruknya kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dari instansi pemerintah. Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya.

Menurut Nuraini dan Indudewi (2013:2) Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Halim (2004) dalam Herawaty (2011:32) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan

tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak untuk diberi penjelasan, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian laporan tersebut akan dinilai oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun berikutnya. Pada tahun 2012 hanya terdapat 2 instansi pemerintah pusat yang mendapatkan kategori nilai A (sangat baik). 26 instansi dengan kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan), 48 instansi dengan kategori nilai CC (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), kemudian masih terdapat kementerian lembaga yang mendapatkan kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar. (www.menpan.go.id). Apabila dilihat dari data tersebut, masih banyak instansi pemerintah pusat yang belum memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang harus memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja sejalan dengan program-program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BATAN melaporkan akuntabilitas kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 BATAN melaporkan LAKIP yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahun kelima (terakhir) dari periode Renstra BATAN 2010-2014. Laporan Kinerja BATAN Tahun 2014

menyajikan capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

BATAN terus berupaya meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga litbang. Pada Tahun 2014 BATAN telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi komitmennya untuk melaksanakan kegiatan litbang iptek nuklir didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja, serta Rencana Strategis (Renstra) BATAN 2010-2014 secara berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. pada tahun 2014, Kementerian PAN dan RB memberikan nilai B pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BATAN.

Dari sisi penyerapan anggaran BATAN pada tahun 2014 cukup tinggi. Yakni Pagu anggaran BATAN tahun 2014 sebesar Rp. 667.824.587.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.618.518.731.909,00 atau 92,62%. Sama dengan capaian sasaran anggaran BATAN pada tahun 2013 sebesar Rp.714.010.836.017,00 atau 92,87% dari total pagu anggaran sebesar Rp.768.832.946.000,00.

Namun masih terdapat sedikit kekurangan pada BATAN yakni masih kurangnya pemahaman para penanggungjawab kegiatan akan penentuan sasaran anggaran yang jelas. Tanpa adanya sasaran anggaran dan kinerja yang jelas, para penanggungjawab kegiatan akan sulit dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan menuangkannya kedalam laporan akuntabilitas kinerja. Kemudian para penanggungjawab kegiatan BATAN masih belum dapat merumuskan tingkat indikator sasaran yang dapat mempermudah pengukuran capaian atau output yang telah dicapai. Output atau keluaran yang tidak dibarengi dengan perumusan

indikator yang jelas dan terarah juga mempengaruhi kualitas laporan akuntabilitas kinerja BATAN

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintahan, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparatur sipil negara untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparatur sipil negara akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Selain itu para penanggungjawab kegiatan BATAN masih belum dapat merumuskan tingkat indikator sasaran kinerja yang dapat mempermudah pengukuran capaian atau output yang telah dicapai. Output atau keluaran yang tidak dibarengi dengan perumusan indikator kinerja yang jelas dan terarah juga mempengaruhi kualitas laporan akuntabilitas kinerja BATAN.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja. Target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun, sehingga diketahui celah kinerja dan perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah daripada target. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Kemudian masih terdapat kekurangan dalam pengendalian akuntansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya

temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014 terkait pengelolaan PNBPN dan pencatatan persediaan khususnya bahan baku penelitian. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Selanjutnya Nasir (2011:2) mengemukakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi yang efektif. Aini (2014:4) juga mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja individu yang bersangkutan. Teknologi informasi dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna serta dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain. Teknologi informasi mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal, dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, serta masih minimnya penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan pada instansi pemerintah pusat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi**

Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kementerian lembaga yang mendapatkan kategori nilai CC kebawah
2. Masih kurangnya pemahaman para penanggungjawab kegiatan BATAN akan penentuan sasaran anggaran yang jelas.
3. Belum optimalnya perumusan indikator sasaran kinerja.
4. Masih adanya temuan BPK terkait pengelolaan PNBPN dan pencatatan persediaan bahan baku penelitian.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka batasan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah:

1. Hanya terdapat empat variabel dalam penelitian ini, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Penelitian dilakukan pada lembaga pemerintah non kementerian Badan Tenaga Nuklir Nasional

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Tenaga Nuklir Nasional?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Tenaga Nuklir Nasional?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Tenaga Nuklir Nasional?

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan memberikan tambahan literatur mengenai akuntansi pemerintah pusat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penanggungjawab kegiatan dan para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah BATAN dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.